

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG



RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB.I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS	
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG	8
 TAHUN 2023.....	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian program renstra Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	8
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	12
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Kota Tanjungpinang.....	15
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	17
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN	19
 KEGIATAN.....	
3.1. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.....	19
3.2. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	23
BAB IV. PENUTUP.....	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNYA penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, sebagai pedoman utama Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama kurun waktu satu tahun. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang


Drs. RIONO, M Si
Pembina Utama Madya
Nip.196704161994011001



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan bernegara, disusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek (1 Tahun) baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RKPD) Kota Tanjungpinang diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengintegrasian perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu, perencanaan pembangunan jangka pendek yang menjadi pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan



demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitive.

Selanjutnya, pada penyusunan Renja 2023 ini dilakukan penyesuaian berupa pemetaan serta pemutakhiran program/kegiatan RPJMD/RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
 12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
 13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
 14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota



Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33 Tambahan lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah (RENSTRA) Dinas lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, serta menggambarkan capaian yang dapat ditranformasikan kedalam Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah:

1. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023.
2. Menjabarkan arah RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
3. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
4. Sebagai Pedoman Penyusunan KUA PPAS, RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

1. BAB I. Pendahuluan

Pada Bab I Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menjelaskan tentang gambaran umum



penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti yang dideskripsikan dibawah ini:

1.1. Latar Belakang

Menggambarkan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mendeskripsikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan dokumen RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar dokumen.

2. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Lalu

Menjelaskan tentang Evaluasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 dan target capaian pencapaian Tahun Anggaran 2021.

3. BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan

Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang perlu diambil suatu tujuan,



yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan.

4. BAB IV. Penutup

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat menjadi efektif dan efisien.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Program Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang



Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah pada pasal 1 point 2 bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	<p>Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang</p> <ul style="list-style-type: none">• Indeks Kualitas Air• Indeks Kualitas Udara• Indeks Kualitas Tutupan Lahan <p>Persentase RAD Perubahan Iklim</p> <p>Persentase Penyediaan Data dan Informasi tentang lingkungan hidup yang Up to Date</p>	<p>Untuk mengetahui persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang</p> <p>Untuk mengetahui nilai indeks kualitas air, udara dan tutupan hutan</p> <p>Untuk mengetahui persentase RAD perubahan iklim</p> <p>Untuk mengetahui penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup</p>

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.



Evaluasi Program Tahun 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2021 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 9.947.108.100 (Belanja Operasi Rp. 9.082.998.500, terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 6.055.952.041 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.027.046.459 dan Belanja Modal Rp. 864.109.600 (terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 664.109.600 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 200.000.000).

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan urusan Tanjungpinang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp. 9.947.108.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.294.772.859 atau 83,39% dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 83.68%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp. 23.334.614.784,- Belanja Operasi sebesar Rp. 21.283.233.944 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.414.445.853, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.828.788.091 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 40.000.000. Belanja Modal Rp. 2.051.380.840 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.047.180.840 dan Belanja Modal Gedung dan Bagunan sebesar Rp. 4.200.000.

Selain itu pada tahun anggaran 2022 dengan berpindahnya tuisi penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan uraian pelaksanaan anggaran SKPD bertambah satu kode rekening pendapatan daerah berupa Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.530.000.000 terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan sebesar Rp. 1.450.000.000 dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp. 80.000.000).



Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

- a. Pandemi Covid 19 menyebabkan penyelenggaraan pembinaan pengurangan sampah ke masyarakat harus di tunda.
- b. Tidak tersedianya sarana dan prasarana dalam penentuan Indeks Kualitas Air.
- c. Tidak tersedianya anggaran dalam penentuan indeks kualitas udara dan Penyusunan RAD Perubahan Iklim.
- d. Perubahan kebijakan dan minimnya data pendukung terkait perhitungan Indeks Tutupan Lahan

Pemecahan masalah dari 4 permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran di bidang lingkungan hidup.
2. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui program diklat teknis.
3. Berkerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pemantauan kualitas lingkungan hidup.
4. Mengajukan Sarana dan prasarana pendukung.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Selain itu, dengan dikeluarkannya

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki 4 (empat) bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Setelah dikeluarkannya Perwako Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, serta Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, mengakibatkan beban kerja Dinas Lingkungan Hidup yang awalnya hanya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditambah dengan pengelolaan persampahan secara keseluruhan.

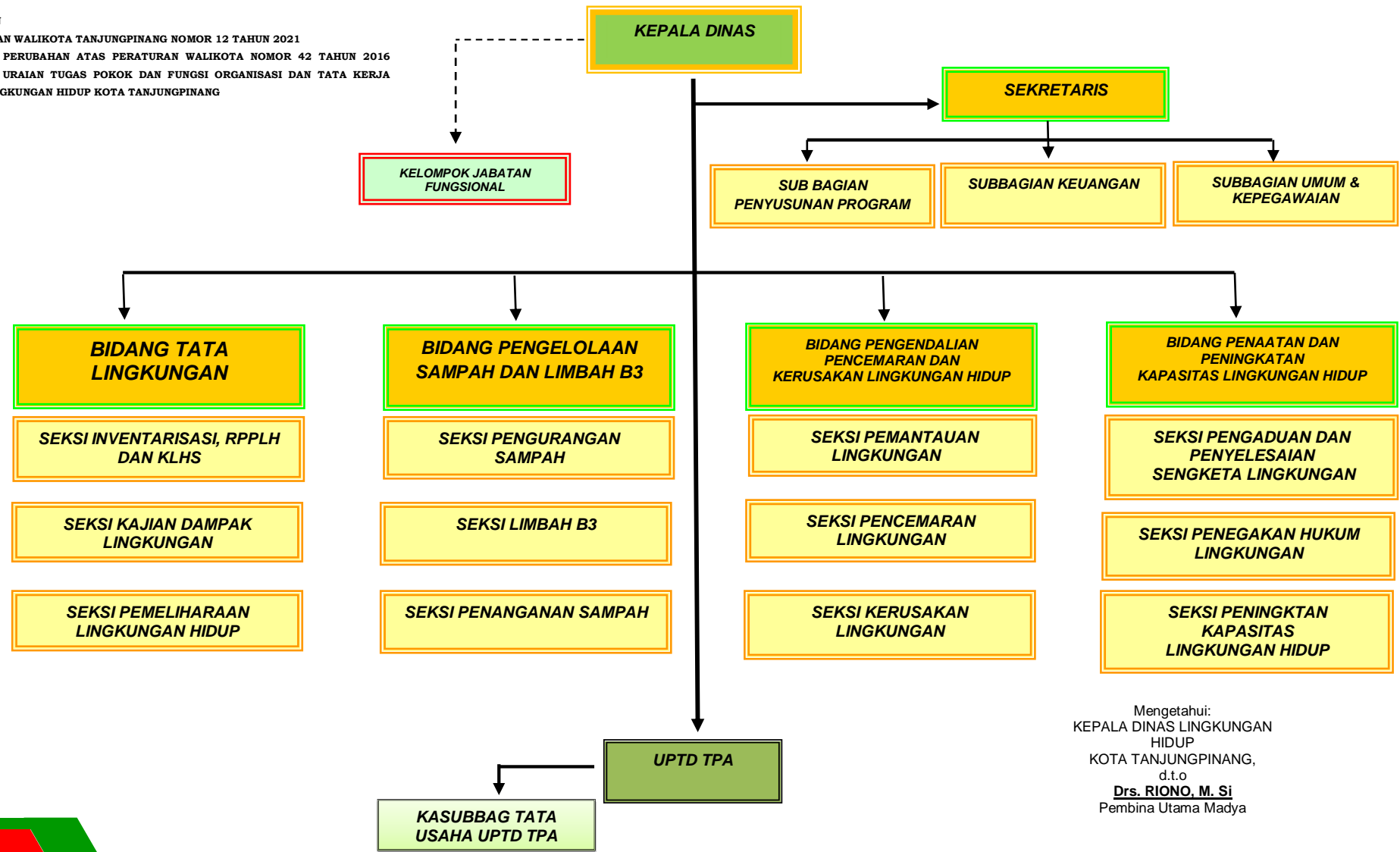
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang secara jelas digambarkan pada gambar dibawah ini.



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG**

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG



Mengetahui:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG,
d.t.o
Drs. RIONO, M. Si
Pembina Utama Madya



Keterangan :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terbentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 396 orang, terdiri dari 48 PNS, 15 orang Pegawai Tidak Tetap, 7 Orang Pegawai Administrasi (THL), 1 Orang Satpam, 2 orang cleaning servis dan 323 orang Tenaga Kebersihan (THL).

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	S2	4	-	4
2	S1	27	6	33
3	D3	4	2	6
4	SMA, SMP, SMA Sederajat	11	342	353

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Desember 2021

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.530.000.000,-. Belanja Operasi sebesar Rp. 21.283.233.944,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.414.445.853,- Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 14.282.788.091,- dan Belanja Bantuan Sosial Rp. 40.000.000. Selanjutnya, Belanja Modal sebesar



Rp. 2.051.380.840,- terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.047.180.840,- dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp. 4.200.000. Total Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.286.304.054-.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup

✓ Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang akan datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung;
4. Potensi permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan adanya program prioritas strategis / nasional;
5. Program prioritas Nasional dan Provinsi yang berada di Kota Tanjungpinang;
6. Peningkatan koordinasi pelayanan (izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan sementara limbah B3, izin pembuangan air limbah terolah ke tanah, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan);
7. Perbaikan manajemen pengelolaan sampah;
8. Peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;



9. Adanya penguasaan di kawasan lindung oleh perorangan / individu;
10. Meningkatnya usaha / kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan;
11. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur di bidang lingkungan hidup;
12. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
13. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
14. Belum padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan baru.

✓ **Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang – undangan di bidang Lingkungan Hidup termasuk Peraturan Daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
4. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Penanggung Jawab Usaha / kegiatan dan Komunitas Masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Meningkatnya atensi secara global tentang isu lingkungan dan perubahan iklim;



6. Adanya peluang pendanaa pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
7. Adanya Program dan Kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;
8. Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD

Pada Rancangan awal RKPD yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 terdiri dari 8 (delapan) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 12.795.344.431,-. Matrik terlampir.

Pada Rancangan RKPD yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 terdiri dari 10 (Sepuluh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan, dan 45 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 55.205.653.992,-. Matrik terlampir.

Pada Musrembang Rencana RKPD yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 terdiri dari 10 (Sepuluh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan, dan 45 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 58.339.653.992,-. Matrik terlampir.

Pada Rancangan Akhir RKPD yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 terdiri dari 10 (Sepuluh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 58.339.653.992,-. Matrik terlampir.



2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Kegiatan Prioritas Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan penyengat sebanyak 25 orang.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota di Kelurahan Penyengat sebanyak 1 Paket.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kelurahan Penyengat sebanyak 50 Unit.
4. Pembinaan Sosialisasi Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang di Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru sebanyak 1 Paket.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan Ukuran 20 M x 10 M sebanyak 1 Unit.
6. Penyediaan Peralatan Makanan dan Minuman Ramah Lingkungan di Kelurahan Pinang Kencana sebanyak 1 paket.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang beserta indikator kinerjanya, yaitu :

Tujuan ke – 1 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan

Tujuan pertama ditetapkan untuk melaksanakan misi pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan merupakan kebutuhan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dengan strategi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sehingga menjadi pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui konservasi lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan.



Untuk mewujudkan tujuan pertama tersebut dilakukan dengan melakukan :

- pendataan dan perencanaan bidang lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelayanan dan pembinaan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara sesuai dengan kriteria baku mutu dan terhadap kerusakan tanah dan/atau lahan serta kerusakan lingkungan di kawasan laut dan pesisir;
- pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup;
- peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan B3; dan
- meningkatkan upaya pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lahan akibat pencemaran dan produksi biomassa.

Indikator kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertama ini adalah :

1. Tersedianya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 100%
2. Tersusunnya dokumen RPPLH 100%
3. Tersedianya dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 100%
4. Tersusunnya KLHS RTRW 100%



5. Tersusunnya KLHS RPJMD 100%
6. Terlaksananya bimbingan teknis terhadap komisi penilai Amdal dan UKL UPL 100%
7. Terlaksananya pembinaan kampung iklim terhadap 13 lokasi kampung iklim
8. Tersedianya dokumen inventarisasi gas rumah kaca (1 dokumen)
9. Tersedianya profil gas rumah kaca setiap tahun Tersedianya RAD Adaptasi Perubahan Iklim (1 dokumen)
10. Terlaksananya aksi pengendalian dampak perubahan iklim
11. Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi sebanyak 1.000 kendaraan bermotor roda empat
12. Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 25 lokasi dengan rincian 20 lokasi udara ambien dan 5 lokasi passive sampler
13. Jumlah titik lokasi yang dipantau kualitas airnya sebanyak 50 titik lokasi dengan rincian 35 titik lokasi pemantauan kualitas air untuk laporan pemantauan tahunan, 15 titik lokasi pemantauan kualitas air untuk data Indeks Kualitas Air (IKA)
14. Persentase pemulihan lahan/tanah yang rusak akibat produksi biomasa sebesar 50%
15. Jumlah sumur resapan yang terealisasi dari kondisi awal 62 lokasi menjadi 200 lokasi
16. Jumlah lubang biopori yang terealisasi sebanyak 600 titik lokasi
17. Persentase pengurangan sampah sebesar 27%
18. Persentase penanganan sampah sebesar 72%
19. Target Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 61.09%
20. Persentase ketaatan usaha skala kecil dalam mengelola dampak lingkungan hidup sebesar 10%



21. Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan sebesar 40%
22. Persentase jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%
23. Jumlah sekolah yang menerapkan 3R dari kondisi awal sebanyak 12 sekolah menjadi 50 sekolah
24. Persentase peningkatan kapasitas kader lingkungan hidup sebanyak 30 persen

Tujuan ke – 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup

Tujuan kedua ditetapkan untuk melaksanakan misi kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan secara optimal dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya.

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup dengan strategi Pembinaan peningkatan kapasitas kemampuan teknis PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.



Untuk melaksanakan strategi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yaitu Aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya

Indikator kinerja yang hendak dicapai dalam melaksanakan tujuan kedua ini adalah :

1. Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).
2. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang lingkungan hidup.
3. Jumlah petugas yang memiliki sertifikasi Penyusun dan/atau Penilai AMDAL.
4. Presentase peningkatan kemampuan teknis lainnya.

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Adapun program dan kegiatan dari Dinas lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan antara lain:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

B. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota



- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Kegiatan Penaggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat
 - Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- C. Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 Tahun. Guna untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya partisipasi serta koordinasi yang sebaikbaiknya dari semua pihak serta aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Perumusan dan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini. Penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan.



LAPORAN REALISASI KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)				REALISASI FISIK	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)				Ket
		URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)		URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Rp 7.310.930.355	Rp 7.211.164.316	98,64%	98,71%					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 9.405.833	Rp 9.014.645	95,84%	100,00%					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana	Rp 9.405.833	Rp 9.014.645	95,84%	100,0%	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100,00%	12 bulan	100%	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0%	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	0,00%	12 bulan	100%	Refo
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 6.055.952.041	Rp 6.031.840.909	99,60%	100,0%					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana	Rp 6.055.952.041	Rp 6.031.840.909	99,60%	100,0%	Terlaksananya penyediaan gaji ASN Terlaksananya penyediaan tunjangan ASN	100,00%	12 bulan	100%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp -	Rp -	#DIV/0!	0%					
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0%	Meningkatnya SDM dalam menjalankan Tugas dan Fungsi	0,00%	12 bulan	100%	Refo



2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0%	Bimbingan teknis terhadap tim teknis dan sekretariat AMDAL Kota Tanjungpinangserta dunia usaha di Kota Tanjungpinang	0,00%	12 bulan	100%	Refo
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 371.123.081	Rp 343.028.815	92,43%	93,57%					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana	Rp 19.321.500	Rp 19.317.046	99,98%	100,00%	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00%	12 bulan	100%	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana	Rp 18.109.300	Rp 18.055.819	99,70%	100,00%	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	12 bulan	100%	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana	Rp 29.109.600	Rp 28.964.100	99,50%	100%	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	100,00%	12 bulan	100%	Refo
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana	Rp 99.855.681	Rp 99.810.846	99,96%	100,00%	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100,00%	12 bulan	100%	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana	Rp 101.504.000	Rp 101.309.956	99,81%	100,00%	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	12 bulan	100%	
6	Penyediaan Bahan/Material	Dana	Rp 15.000.000	Rp -	0,00%	55%	Terlaksananya penyediaan bahan / material	100,00%	12 bulan	100%	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana	Rp 88.223.000	Rp 75.571.048	85,66%	100,00%	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,00%	12 bulan	100%	Refo
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 510.108.400	Rp 467.937.008	91,73%	100,00%					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp 144.596.000	Rp 111.445.688	77,07%	100,0%	Terbayarnya tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	12 bulan	100%	Refo



	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp 365.512.400	Rp 356.491.320	97,53%	100,0%	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100,00%	12 bulan	100%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 364.341.000	Rp 359.342.939	98,63%	100,00%					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp 144.578.000	Rp 143.980.430	99,59%	100,00%	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajakkendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100,00%	12 bulan	100%	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp 128.723.000	Rp 124.570.709	96,77%	100,00%	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100,00%	12 bulan	100%	
	3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Rp 91.040.000	Rp 90.791.800	99,73%	100,00%	Terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya	100,00%	12 bulan	100%	Refo
2		Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan		Rp 717.764.740	Rp 707.025.757	98,50%	100,00%					
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rp 247.982.859	Rp 240.801.237	97,10%	100,00%					
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dana	Rp 9.946.997	Rp 8.605.097	86,51%	100,0%	Terpantaunya kualitas lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang	2%	12 Bulan	100,00%	Refo



2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dana	Rp 238.035.862	Rp 232.196.140	97,55%	100,0%	Terlaksananya Pembinaan 13 lokasi Kampung Iklim di Kota Tanjungpinang	100%	12 bulan	100,00%	Refo
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rp 469.781.881	Rp 466.224.520	99,24%	100,00%					
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dana	Rp 469.781.881	Rp 466.224.520	99,24%	100,0%	Tersedianya dokumen Informasi kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai laporan akuntabilitas Pemerintah Kota Tanjungpinang di Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen	12 bulan	100,00%	Refo
							Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMDP	1 Dokumen	12 bulan	100,00%	
							Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW	1 Dokumen	12 bulan	100,00%	
2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dana	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%	Terehabilitasi dan terpulihnya cadangan sumber daya alam yakni air dan lahan	0%	12 bulan	100,00%	Refo
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rp -	Rp -	#DIV/0!	0%					



1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dana	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggungjawab usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan	0%	12 bulan	100,00%	Refo
							Meningkatnya penanganan dan penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan	100%	12 bulan	100,00%	
							Sekolah yang mengikuti penilaian dan pembinaan Adwiyata	0%	12 bulan	100,00%	
3	Program Pengelolaan Persampahan		Rp 399.852.905	Rp 376.582.786	94,18%	100,00%					
	Pengelolaan Sampah		Rp 399.852.905	Rp 376.582.786	94,18%	100,00%					
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dana	Rp 399.852.905	Rp 376.582.786	94,18%	100,00%	Meningkatnya kemampuan kota Tanjungpinang dalam mengelola lingkungan hidup melalui penilaian ADIPURA 2021	0%	12 bulan	100,00%	Refo
							Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga	100%	12 bulan	100,00%	
							Meningkatnya peran serta masyarakat untuk peduli sampah	100%	12 bulan	100,00%	
							Terbinanya warga masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan	18 Kelurahan	12 bulan	100,00%	



							dengan penanganan sampah					
4	pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3			Rp 1.518.560.100	Rp -	0,00%	36,00%					
	Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota			Rp 1.518.560.100	Rp -	0,00%	36,00%					
	1	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Dana	Rp 1.518.560.100	Rp -	0,00%	36,00%	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	100%	2 Bulan	100,00%	DAK
Jumlah				Rp 9.947.108.100	Rp 8.294.772.859	83,39%	83,68%					



**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
KEMENDAGRI 050 TAHUN 2020**

RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya jasa tenaga pendukung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 465.000.000
		Operasional Rutin Kantor	Tersedianya operasional rutin kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 128.200.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 50.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp 10.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 300.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 50.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 150.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 100.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Rp 50.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp 50.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 200.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 200.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 200.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 350.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 150.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	Rp 100.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp 200.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 300.000.000
		Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tersedianya operasional rutin kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp 250.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 100.000.000
Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pesentase pemingkatan perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 43.923.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 43.923.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan	Pengadaan Sarpras dan Peralatan Alat Laboratorium	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Rp 815.005.906
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpantaunya kualitas lingkungan di Kota Tanjungpinang	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 286.304.755
		Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	terujinya emisi kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp 732.050.000
		Pengendalian Kerusakan Lahan/Tanah Akibat Produksi Biomassa	meningkatnya kualitas tanah		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp 224.300.120



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	tersedianya indeks kualitas lingkungan hidup untuk menjadi indikator dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp 366.025.000
		Koordinasi Penilaian Adipura	meningkatnya kemampuan kota Tanjungpinang dalam mengelola lingkungan hidup melalui penilaian ADIPURA 2023	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Rp 805.255.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Bimtek Komisi Penilai AMDAL	meningkatnya kemampuan komisi penilai AMDAL Kota Tanjungpinang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 242.000.000
		Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	meningkatnya penanganan dan penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang dapat ditindaklanjuti	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Rp 140.553.600
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 528.942.728



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berwawasan lingkungan)	Sekolah yang mengikuti penilaian dan pembinaan ADIWIYATA	PROGRM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp 355.410.275
		Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3	Terantau dan terawasinya kegiatan yang menghasilkan limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Rp 292.820.000
		Pengendalian Kerusakan kawasan sungai	meningkatkan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Rp 300.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air	bertambahnya tutupan lahan pada daerah tangkapan air dan sumber air		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Rp 420.928.750
		Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	tersusunnya dokumen KLHS RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp 350.000.000
		Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan sumber pencemaran air	terbinanya usaha dan /atau kegiatan sumber pencemar air	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp 220.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Penyusunan Profil GRK	tersedianya data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp 80.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	terlaksananya penghijauan sebagai upaya pengendalian dampak perubahan iklim akibat sektor energi					Rp 433.271.113
		Pembinaan Kampung Iklim	terlaksananya pembinaan 13 lokasi kampung iklim di Kota Tanjungpinang					Rp 219.615.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
Progrm Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	tersedianya dokumen informasi kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai laporan akuntabilitas Pemerintah Kota Tanjungpinang di Bidang Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Rp 188.283.260
		Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	tersedianya duta lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp 392.993.722



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 168.517.910
		Bimtek Penyuluh Lingkungan	tersedianya penyuluh lingkungan hidup yang aktif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 266.200.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (DLH)		Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	terbinanya masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan penanganan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp 366.025.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Gerakan Tanjungpinang Peduli Sampah	meningkatnya peran serta masyarakat untuk peduli sampah				Berbasis Masyarakat	Rp 219.615.000
		Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga					Rp 268.862.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (DPRK2P2)		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp 4.835.000.000
		Penyediaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman						Rp 1.400.000.000



RPJMD		RKPD 2023		PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI 050 TAHUN 2020				PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan						Rp 405.200.000
		Operasional UPTD TPA dan IPLT		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp -



**RANCANGAN AWAL KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023**

Program/ Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Sumber Dana	Kodefikasi
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Rp 394.400.000	APBD	K1
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Rp 200.000.000	APBD	K2



	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	Rp 242.000.000	APBD	K4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 300.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 250.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp 100.000.000	APBD	K9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1	Rp 50.000.000	APBD	K1



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 360.519.292	APBD	K1
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit	10	Rp 100.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	Rp 250.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	Rp 300.000.000	APBD	K9
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp 10.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 835.800.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	Rp 200.000.000	APBD	K1



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	Unit	50	Rp 190.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 815.005.906	APBD	K3
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9 Dokumen	Rp 1.608.679.875	APBD	K3



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	3 Dokumen	Rp 732.886.113	APBD	K3
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	1,00	Rp 720.928.750	APBD	K9
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 188.283.260	APBD	K3
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Dokumen	1 Dokumen	Rp 140.553.600	APBD	K3



PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/kota						
	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	1	Rp 748.403.997	APBD	K3
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3						
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1 Laporan	Rp 292.820.000	APBD	K3



PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	Rp 350.000.000	APBD	K2
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 528.942.728	APBD	K3



	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 220.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 168.517.910	APBD	K9
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	Rp 620.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							



	Kegiatan Pengelolaan Sampah						
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	18 Kelompok	Rp 854.502.000	APBD	K3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1 Dokumen	Rp 805.255.000	APBD	K2
TOTAL					Rp 12.795.344.431		



**RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023**

Program/ Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Sumber Dana	Kodefikasi
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	48 Orang	Rp 6.414.445.353	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Rp 328.200.000	APBD	K1
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Rp 800.000.000	APBD	K2



	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	Rp 242.000.000	APBD	K4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1.300.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp 350.000.000	APBD	K9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1	Rp 50.000.000	APBD	K1



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Rp 10.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit	10	Rp 600.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	Rp 300.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	Rp 1.000.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	Rp 500.000.000	APBD	K9
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 17.026.850.390	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	Unit	50	Rp 250.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 815.005.906	APBD	K3



	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9 Dokumen	Rp 2.745.012.985	APBD	K3
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.032.886.113	APBD	K3
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	1,00	Rp 720.928.750	APBD	K9
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 188.283.260	APBD	K3
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							



	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Dokumen	1 Dokumen	Rp 140.553.600	APBD	K3
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/kota						
	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	1	Rp 748.403.997	APBD	K3
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3						



	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1 Laporan	Rp 292.820.000	APBD	K3
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	Rp 700.000.000	APBD	K2
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						



	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 528.942.728	APBD	K3
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 220.000.000	APBD	K9
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1 Dokumen	Rp 265.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							



	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 200.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 168.517.910	APBD	K9
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	Rp 620.000.000	APBD	K9



PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Kegiatan Pengelolaan Sampah						
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	18 Kelompok	Rp 1.654.502.000	APBD	K3
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	100%	Rp 6.750.200.000	APBD	K3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.105.255.000	APBD	K2



	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	Rp 450.000.000	APBD	K2
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	31758	Rp 5.100.000.000	APBD	K3
TOTAL					Rp 55.205.653.992		



**MUSREMBANG DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023**

Program/ Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Sumber Dana	Kodefikasi
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	48 Orang	Rp 6.414.445.353	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Rp 328.200.000	APBD	K1



	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Rp 800.000.000	APBD	K2
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	Rp 242.000.000	APBD	K4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1.300.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp 350.000.000	APBD	K9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1	Rp 50.000.000	APBD	K1



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Rp 10.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit	10	Rp 600.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	Rp 300.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	Rp 1.000.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	Rp 500.000.000	APBD	K9
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 17.026.850.390	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	Unit	50	Rp 250.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 815.005.906	APBD	K3



	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9 Dokumen	Rp 2.745.012.985	APBD	K3
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.032.886.113	APBD	K3
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	1,00	Rp 720.928.750	APBD	K9
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 188.283.260	APBD	K3
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							



	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Dokumen	1 Dokumen	Rp 140.553.600	APBD	K3
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/kota						
	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	1	Rp 748.403.997	APBD	K3
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3						



	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1 Laporan	Rp 292.820.000	APBD	K3
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	Rp 700.000.000	APBD	K2
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						



	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 528.942.728	APBD	K3
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 220.000.000	APBD	K9
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1 Dokumen	Rp 265.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							



	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 200.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 168.517.910	APBD	K9
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	Rp 620.000.000	APBD	K9



PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Kegiatan Pengelolaan Sampah						
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	18 Kelompok	Rp 1.654.502.000	APBD	K3
		Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Orang	25 Orang	Rp 100.000.000	APBD	K7
		Pembinaan Sosialisasi Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang	Paket	1 Paket	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Penyediaan Peralatan Makanan dan Minuman Ramah Lingkungan	Paket	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD	K7
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 200.000.000	APBD	K10
		Penyediaan Peralatan Makanan dan Minuman Ramah Lingkungan	Paket	1 Paket	Rp 300.000.000	APBD	K10



		Pembinaan Sosialisasi Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang	Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 300.000.000	APBD	K10
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 300.000.000	APBD	K10
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	100%	Rp 6.750.200.000	APBD	K3
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Paket	1 Paket	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Unit	50 Unit	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Meter	20 Meter x 10 Meter	Rp 200.000.000	APBD	K7



	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.105.255.000	APBD	K2
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	Rp 450.000.000	APBD	K2
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Rp 5.100.000.000	APBD	K3
TOTAL					Rp 57.255.653.992		



**RANCANGAN AKHIR KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023**

Program/ Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Sumber Dana	Kodefikasi
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	Rp 43.923.000	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	48 Orang	Rp 6.414.445.353	APBD	K1
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Rp 328.200.000	APBD	K1



	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Rp 800.000.000	APBD	K2
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	Rp 242.000.000	APBD	K4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1.300.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp 350.000.000	APBD	K9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1	Rp 50.000.000	APBD	K1



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Rp 10.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit	10	Rp 600.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	Rp 300.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	Rp 1.000.000.000	APBD	K9
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	Rp 500.000.000	APBD	K9
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 17.026.850.390	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	Rp 200.000.000	APBD	K1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	Rp 350.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	Unit	50	Rp 250.000.000	APBD	K1
	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 50.000.000	APBD	K1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 815.005.906	APBD	K3



	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9 Dokumen	Rp 2.745.012.985	APBD	K3
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.232.886.113	APBD	K3
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	1,00	Rp 720.928.750	APBD	K9
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 188.283.260	APBD	K3
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							



	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Dokumen	1 Dokumen	Rp 140.553.600	APBD	K3
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/kota						
	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	1	Rp 748.403.997	APBD	K3
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3						



	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1 Laporan	Rp 292.820.000	APBD	K3
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Kegiatan Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	Rp 700.000.000	APBD	K2
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						



	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	Rp 528.942.728	APBD	K3
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 220.000.000	APBD	K9
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1 Dokumen	Rp 265.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							



	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 200.000.000	APBD	K9
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	25	Rp 168.517.910	APBD	K9
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	Rp 620.000.000	APBD	K9



PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Kegiatan Pengelolaan Sampah						
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	18 Kelompok	Rp 1.654.502.000	APBD	K3
		Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Orang	25 Orang	Rp 100.000.000	APBD	K7
		Pembinaan Sosialisasi Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang	Paket	1 Paket	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Penyediaan Peralatan Makanan dan Minuman Ramah Lingkungan	Paket	1 Paket	Rp 50.000.000	APBD	K7
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 200.000.000	APBD	K10
		Penyediaan Peralatan Makanan dan Minuman Ramah Lingkungan	Paket	1 Paket	Rp 300.000.000	APBD	K10
		Pembinaan Sosialisasi Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang	Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 300.000.000	APBD	K10



		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 300.000.000	APBD	K10
		Pengadaan Baju Teknik Bank Sampah	Pcs	336	Rp 84.000.000	APBD	K2
		Pengadaan Roda Tiga Bank Sampah	Unit	10	Rp 350.000.000	APBD	K2
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	100%	Rp 6.750.200.000	APBD	K3
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Paket	1 Paket	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Unit	50 Unit	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Meter	20 Meter x 10 Meter	Rp 200.000.000	APBD	K7
		Pengadaan Tong Sampah	Unit	1000	Rp 450.000.000	APBD	K2



	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.105.255.000	APBD	K2
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	Rp 450.000.000	APBD	K2
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	31785 Ton	Rp 5.100.000.000	APBD	K3
TOTAL					Rp 58.339.653.992		